

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan dan pemenuhan gizi anak merupakan elemen fundamental dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Namun demikian, permasalahan malnutrisi serta keterbatasan akses terhadap pangan yang bergizi masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara. Ketersediaan dan akses terhadap asupan gizi yang memadai merupakan kebutuhan dasar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi kesehatan, proses pertumbuhan, serta perkembangan individu, khususnya pada kelompok yang rentan, seperti anak-anak dan perempuan. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas gizi perlu terus dikembangkan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Syarah, 2024:15).

Permasalahan gizi tidak hanya berimplikasi pada status kesehatan individu, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Berbagai data global menunjukkan bahwa kasus malnutrisi, stunting, wasting, serta obesitas pada anak usia sekolah masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan fisik, menurunkan kemampuan kognitif, memengaruhi capaian akademik, serta mengurangi tingkat produktivitas individu pada saat memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, isu gizi tidak lagi dipahami hanya sebagai

persoalan kesehatan semata, melainkan telah berkembang menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional karena memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan kualitas generasi penerus bangsa di masa mendatang (Febryanti et al., 2025; Suardi & Purmadani, 2025:45-47).

Di Indonesia, permasalahan stunting dan kekurangan gizi masih menjadi salah satu isu prioritas yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Anak-anak yang mengalami defisiensi gizi berisiko mengalami hambatan dalam proses belajar, memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah, serta menghadapi penurunan produktivitas ketika memasuki usia dewasa. Dalam perspektif jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap daya saing nasional di tengah dinamika persaingan global yang semakin ketat. Oleh sebab itu, upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak usia sekolah, menjadi komponen penting dalam agenda pembangunan nasional karena berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai salah satu strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan gizi, sejumlah negara telah mengimplementasikan program makan gratis di sekolah sebagai bagian dari kebijakan publik. Berbagai program tersebut, seperti *Brazilian National School Feeding Programme* (PNAE) di Brasil, sistem makan gratis nasional di Finlandia, *Midday Meal Scheme* di India, *National School Lunch Program* (NSLP) di Amerika Serikat, program *Kyushoku* di Jepang, serta *Rural Student Nutrition Improvement Program* di Tiongkok, menunjukkan bahwa intervensi gizi yang dilaksanakan melalui lingkungan sekolah dapat memberikan

kontribusi positif terhadap peningkatan tingkat kehadiran peserta didik, kemampuan konsentrasi dalam proses pembelajaran, serta perbaikan status kesehatan anak secara keseluruhan (Febryanti et al., 2025:122 Ramlan et al., 2025:88).

Pengalaman yang diperoleh dari berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Program makan gratis tidak hanya dipandang sebagai instrumen bantuan sosial, melainkan juga sebagai kebijakan strategis yang terintegrasi dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan implementasi program tersebut menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negara secara berkelanjutan.

Berbagai referensi internasional tersebut kemudian menjadi salah satu landasan inspiratif bagi gagasan serupa yang mulai dirumuskan di Indonesia. Namun penting untuk dipahami bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi kebijakan nasional tidak semata-mata lahir dari pertimbangan teknis penanganan gizi, melainkan berakar kuat dari proses politik elektoral yang panjang. Gagasan program makan gratis sesungguhnya telah lama bergulir dalam lingkaran Prabowo Subianto. Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menyatakan bahwa ide ini sudah muncul sejak Juli 2006, jauh sebelum Pilpres 2024 bergulir (Tempo.co, 2024). Prabowo sendiri menyatakan bahwa motivasinya semakin menguat setelah

menyaksikan langsung kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi di berbagai pelosok daerah. Selama masa kampanye, ia kerap bertemu anak-anak yang secara nyata mengalami stunting dan malnutrisi, dan dari pengalaman itulah ia mulai merumuskan program ini secara serius sejak 2023, dengan mengacu pada kenyataan bahwa saat itu sudah ada 77 negara yang memiliki program serupa (DetikFinance, 2025)

Gagasan tersebut kemudian secara resmi memasuki arena politik elektoral ketika Prabowo memutuskan untuk maju kembali dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Pada 9 September 2023, Prabowo untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep "Makan Siang Gratis" kepada publik dalam sebuah acara konsolidasi Partai Gerindra di Jakarta Barat (Portal Islam, 2023). Hanya berselang beberapa minggu kemudian, pada Oktober 2023, program tersebut resmi dicantumkan ke dalam dokumen visi-misi pasangan Prabowo-Gibran yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan rumusan konkret berupa pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren. Langkah ini menandai transformasi gagasan yang semula bersifat wacana menjadi janji politik resmi yang terikat pada dokumen kenegaraan. Pada hari pertama kampanye resmi, 28 November 2023, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran secara serentak menggelar gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia, membangun citra bahwa program tersebut sudah nyata bahkan sebelum pasangan ini terpilih. Para pengamat menilai bahwa program ini memang sejak awal dirancang sebagai instrumen penggalang dukungan suara, dengan memanfaatkan kecenderungan pemilih di akar rumput

yang secara umum menyukai program yang bersifat langsung dan merakyat. Dengan demikian, Program MBG sejak awal tidak bisa dipisahkan dari konteks persaingan electoralia merupakan janji politik yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen mobilisasi massa dan pembentukan citra pemerintahan yang peduli rakyat (Kompas.com, 2024)

Pasangan Prabowo-Gibran berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Seiring kemenangan tersebut, program yang selama kampanye dikenal luas sebagai "makan siang gratis" mulai mengalami pematangan konsep. Pada Mei 2024, nama program diubah menjadi "Makan Bergizi Gratis", disertai perubahan konsep antara lain berupa pergeseran prioritas sumber pangan dari ketergantungan impor menuju produksi dalam negeri, serta penghapusan batasan waktu makan yang sebelumnya hanya terfokus pada jam makan siang (CNN Indonesia, 2024). Perubahan nama ini bukan sekadar kosmetik, melainkan juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memperluas cakupan dan memperkuat legitimasi substantif program. Sebelum Prabowo resmi dilantik, kelembagaan pendukung program sudah disiapkan lebih dulu. Pada Agustus 2024, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang nantinya akan menjadi lembaga pelaksana utama program MBG (Kumparan, 2024). Pembentukan lembaga baru ini, yang dilakukan sekitar tiga bulan sebelum Prabowo resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan yang memastikan bahwa janji kampanye tersebut memiliki fondasi kelembagaan yang siap beroperasi sejak hari pertama pemerintahan baru berjalan. Infrastruktur kebijakan ini dibangun secara sengaja dalam periode transisi, menunjukkan bahwa

MBG diprioritaskan jauh melampaui kebijakan-kebijakan lain yang biasanya baru dirumuskan setelah presiden terpilih dilantik.

Program ini ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah dalam mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan program tersebut diperkuat melalui pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, dengan kelompok sasaran yang meliputi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dari perspektif normatif, kebijakan ini merepresentasikan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang layak dan layanan kesehatan, terutama bagi kelompok yang berada dalam kondisi rentan (Suardi & Purmadani, 2025; Pratiwi et al., 2025:45-47).

Selain memiliki dimensi kesejahteraan sosial, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Melalui penyediaan makanan bergizi secara cuma-cuma, pemerintah berupaya memperkecil kesenjangan sosial, meningkatkan pemerataan akses terhadap asupan nutrisi yang berkualitas, serta mendorong penguatan ekonomi lokal melalui melibatkan berbagai pelaku usaha dalam rantai pasok pangan, seperti petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendukung terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Ramlan et al., 2025:88).

Keterlibatan berbagai aktor ekonomi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memiliki orientasi sosial, tetapi juga mengandung dimensi ekonomi yang signifikan. Implementasi program tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi baru melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal, penciptaan kesempatan kerja, serta penguatan perekonomian di tingkat daerah. Selain itu, dengan dukungan alokasi anggaran negara yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, pemerintah menargetkan agar program ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, MBG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian nasional (Suardi & Purmadani, 2025:45-47)

Peluncuran program MBG secara nasional pada 6 Januari 2025 itu sendiri memiliki makna politik yang tidak dapat diabaikan. Program ini resmi berjalan hanya 78 hari setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden, tanpa menunggu genap 100 hari kerja, dengan cakupan awal di 190 titik yang mencakup 26 provinsi di seluruh Indonesia (BBC Indonesia, 2025; Kompas.com, 2025). Kecepatan peluncuran ini secara tidak langsung menegaskan bahwa MBG bukan sekadar rencana kebijakan biasa, melainkan prioritas utama yang harus segera direalisasikan untuk membuktikan komitmen pemerintahan baru terhadap janji kampanyenya. Presiden Prabowo juga secara terbuka menyatakan bahwa program

ini diharapkan mampu meningkatkan perputaran uang di desa-desa hingga sekitar Rp 8 miliar per desa per tahun, atau delapan kali lipat dibandingkan Dana Desa, sekaligus menegaskan niatnya untuk membalikkan aliran uang yang selama ini tersedot ke pusat agar kembali mengalir ke daerah. Narasi ekonomi-populis ini memperkuat posisi MBG sebagai kebijakan yang dikonstruksi untuk menjawab berbagai kebutuhan sekaligus: peningkatan gizi anak, stimulus ekonomi daerah, sekaligus konsolidasi dukungan politik pasca-pemilu. Sejumlah analisis kebijakan menilai bahwa pilihan mengalokasikan anggaran signifikan bagi MBG mengandung dimensi simbolik dan elektoral yang kuat, sehingga memunculkan pertanyaan apakah program ini didesain terutama sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia, atau lebih dominan sebagai instrumen pemenuhan janji pemilu yang cenderung populis.

Meskipun memiliki tujuan yang strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terlepas dari berbagai tantangan dan perdebatan di ruang publik. Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini hingga saat ini masih memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Di satu sisi, program tersebut memperoleh dukungan karena dinilai mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan gizi yang masih dihadapi masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain, sejumlah kritik juga muncul, terutama yang berkaitan dengan aspek pendanaan, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara, serta penentuan prioritas kebijakan di tengah berbagai kebutuhan pembangunan lainnya, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan

penanggulangan pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan MBG tidak hanya ditentukan oleh tujuan kebijakannya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif serta memastikan bahwa program tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Merlinda & Yusuf, 2025:12).

Perdebatan mengenai aspek pendanaan MBG sesungguhnya telah bergulir sejak program ini masih dalam tahap wacana kampanye. Peneliti anggaran publik dari Seknas FITRA menilai bahwa kinerja APBN yang mulai pulih justru berisiko terganggu oleh pemaksaan program makan siang gratis yang membutuhkan anggaran sangat besar, terutama mengingat keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai program baru dalam skala tersebut. Kekhawatiran ini terbukti tidak berlebihan. Untuk mempercepat cakupan program, Badan Gizi Nasional memperkirakan dibutuhkan tambahan anggaran setidaknya Rp 100 triliun agar seluruh 82,9 juta penerima manfaat dapat terlayani, sementara alokasi awal sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 dinilai oleh kalangan ekonom hanya cukup untuk membiayai program hingga pertengahan tahun. Sebagai respons atas keterbatasan fiskal tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, yang memerintahkan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun, dengan salah satu tujuan yang secara eksplisit disebutkan adalah untuk mendukung pembiayaan program makan bergizi gratis. Kebijakan efisiensi besar-besaran ini menimbulkan polemik tersendiri. Persoalan konstitusional bahkan bergulir ke Mahkamah Konstitusi, ketika sejumlah pihak

menggugat ketentuan dalam UU APBN 2026 yang memasukkan anggaran MBG ke dalam pos anggaran pendidikan. Para pemohon menilai bahwa jika anggaran MBG dikeluarkan dari komponen tersebut, maka anggaran pendidikan murni hanya berkisar 11,9 persen dari APBN, jauh di bawah mandat konstitusional sebesar 20 persen yang diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Kontroversi ini secara tegas menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya merupakan kebijakan gizi, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik-anggaran yang melibatkan berbagai aktor dari eksekutif, legislatif, hingga lembaga peradilan konstitusi.

Di samping perdebatan yang berkaitan dengan aspek penganggaran, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah kendala teknis yang perlu mendapat perhatian. Beberapa studi mengidentifikasi adanya keterbatasan dalam regulasi pelaksanaan, tata kelola program yang belum berjalan secara optimal, keterbatasan dukungan anggaran operasional, serta belum efektifnya koordinasi antarlembaga yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan mekanisme distribusi, ketidakakuratan data penerima manfaat, serta kesenjangan infrastruktur antarwilayah juga menjadi tantangan yang dapat memengaruhi tingkat pemerataan dan keberhasilan program dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal (Febryanti et al., 2025:122)

Dalam implementasinya, kebijakan publik sering kali dihadapkan pada kesenjangan antara tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Fenomena tersebut berpotensi terjadi pula dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah yang masih

menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses distribusi pangan yang belum memadai, serta kapasitas birokrasi yang relatif terbatas. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun mekanisme koordinasi yang efektif, memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, serta menerapkan sistem pengawasan yang akuntabel guna menjamin pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Febryanti et al., 2025:122)

Selain tantangan yang berkaitan dengan implementasi program, aspek keamanan pangan dan perlindungan hak anak juga menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Hak anak untuk memperoleh makanan yang aman, sehat, dan layak merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun demikian, munculnya sejumlah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program pangan publik menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan, penerapan standar keamanan pangan, serta mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut (Riyanto dan Sinaga, 2025:15), meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif memadai dalam menjamin keamanan pangan dan perlindungan hak anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan serta keterbatasan kapasitas teknis dalam pelaksanaan dan pengendalian program.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang relevan dan menarik untuk dijadikan objek penelitian. Kabupaten ini termasuk salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia serta memiliki

karakteristik wilayah yang sangat beragam, mencakup kawasan perkotaan, daerah penyangga ibu kota, hingga wilayah pedesaan dan pegunungan. Keragaman karakteristik tersebut menyebabkan implementasi berbagai kebijakan publik di Kabupaten Bogor menghadapi tingkat kompleksitas yang relatif tinggi, terutama dalam hal distribusi layanan publik, pemerataan akses bagi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Bogor menjadi lokasi yang strategis untuk mengkaji efektivitas implementasi suatu kebijakan publik dalam menghadapi berbagai tantangan administratif, geografis, dan sosial yang beragam.

Selain memiliki jumlah satuan pendidikan dan populasi anak usia sekolah yang relatif besar, Kabupaten Bogor juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti luas wilayah administratif yang cukup besar, ketimpangan ketersediaan infrastruktur antarwilayah, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam. Berbagai faktor tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Bogor dinilai sebagai lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara empiris, termasuk untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, tantangan, serta dinamika yang muncul selama proses pelaksanaannya pada periode 2025–2026. Dengan karakteristik wilayah yang kompleks, penelitian di Kabupaten Bogor diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di tingkat lokal.

Relevansi Kabupaten Bogor sebagai lokasi penelitian semakin menguat ketika menilik dinamika implementasi MBG yang terjadi di wilayah ini. Program MBG di Kabupaten Bogor resmi dimulai bersamaan dengan peluncuran nasional pada 6 Januari 2025. Skala penerima manfaat yang sangat besar ini tentu menghadirkan tantangan logistik, koordinasi, dan pengawasan yang tidak sederhana, mengingat luasnya wilayah dan keragaman kondisi antarwilayah dalam satu kabupaten yang sama. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Bogor adalah Kecamatan Jonggol. Pada September 2025, empat siswa SMPN 1 Jonggol dilaporkan mengalami dugaan keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG, insiden yang secara langsung memantik kekhawatiran publik terhadap standar keamanan pangan dalam program berskala nasional tersebut. Insiden ini tidak hanya berdampak pada kesehatan siswa, tetapi juga menjadi ujian nyata bagi sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang seharusnya menjamin keamanan setiap porsi makanan yang disajikan kepada anak-anak. Tidak hanya soal keamanan pangan, persoalan tata kelola juga turut mencuat dari wilayah yang sama. Muncul dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG di tingkat desa, ketika seorang Kepala Desa di Jonggol dilaporkan terlibat langsung dalam pengelolaan dapur SPPG, kondisi yang dinilai berpotensi mengganggu transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Kedua persoalan ini keamanan pangan dan integritas tata Kelola mencerminkan secara konkret bagaimana tantangan implementasi MBG di tingkat daerah tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga menyentuh dimensi etika pemerintahan dan perlindungan hak dasar warga negara.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang berada pada titik temu antara upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, tantangan tata kelola pemerintahan, keterbatasan sumber daya yang tersedia, serta tuntutan pemenuhan dan perlindungan hak anak. Di satu sisi, program ini diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan gizi serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Namun, di sisi lain, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan evaluasi secara berkelanjutan, mencakup efektivitas implementasi kebijakan, pemerataan distribusi manfaat program, keberlanjutan dukungan anggaran, hingga jaminan keamanan pangan bagi kelompok penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh tujuan kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (Pratiwi et al., 2025:10)

Oleh sebab itu, kajian akademik yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan program, tetapi juga untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi proses implementasi, mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan program, serta memahami dinamika yang berkembang pada tingkat daerah. Melalui kajian tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh

mengenai efektivitas pelaksanaan program serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan nasional yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan kekurangan gizi serta mempercepat penurunan prevalensi stunting, khususnya pada anak usia sekolah dan kelompok masyarakat rentan. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi yang sesuai dengan standar kebutuhan nutrisi, meliputi energi, protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Selain berorientasi pada perbaikan status gizi, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kondisi kesehatan peserta didik sehingga mampu mendukung konsentrasi belajar, meningkatkan partisipasi dalam proses pembelajaran, serta mendorong pencapaian hasil pendidikan yang lebih optimal (Merlinda & Yusuf, 2025:12).

Melalui pelaksanaan program tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi secara merata bagi peserta didik di berbagai wilayah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun di tingkat pusat,

melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, efektivitas sistem distribusi makanan, pengawasan terhadap standar keamanan pangan, serta kualitas koordinasi antarpelaksana program di tingkat operasional. Oleh karena itu, sinergi antaraktor yang terlibat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan Program MBG di lapangan.

Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi Program MBG di tingkat kecamatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis distribusi makanan. Program ini merupakan kebijakan redistributif yang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan yaitu mereka yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Pilihan Kecamatan Jonggol sebagai salah satu lokasi prioritas implementasi MBG di Kabupaten Bogor tidak dapat dilepaskan dari konteks kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya. Data BPS Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa Kecamatan Jonggol termasuk dalam kelompok kecamatan dengan proporsi kemiskinan yang signifikan di wilayah timur Kabupaten Bogor, bersama dengan Sukamakmur dan Cariu yang karakteristiknya relatif serupa. Kondisi geografis yang jauh dari pusat kota, aksesibilitas infrastruktur yang terbatas, serta dominasi mata pencaharian di sektor pertanian menjadikan masyarakat Jonggol sebagai kelompok yang secara struktural lebih rentan terhadap persoalan ketidakcukupan gizi. Dengan kata lain, tingginya cakupan MBG di Kecamatan Jonggol bukan semata-mata karena besarnya jumlah sekolah dan murid di wilayah tersebut, melainkan lebih

disebabkan oleh besarnya proporsi penduduk yang secara nyata memerlukan intervensi kebijakan gizi dari negara. Inilah yang menjadikan Jonggol relevan secara kebijakan sebagai lokus penelitian ini bukan sekadar relevan secara statistik demografis. (Scribd, 2025)

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2025

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan - Maret (Rp)	Garis Kemiskinan - September (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin - Maret (ribu) (Ribu)	Jumlah Penduduk Miskin - September (ribu) (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin - Maret	Persentase Penduduk Miskin - September
Bogor	531.412	...	401,86	...	6,26	...
Sukabumi	431.785	...	164,63	...	6,41	...
Cianjur	482.562	...	232,61	...	9,82	...
Bandung	468.974	...	236,06	...	6,04	...
Garut	407.191	...	252,56	...	9,39	...
Tasikmalaya	413.178	...	185,99	...	10,15	...
Ciamis	483.644	...	88,72	...	7,19	...
Kuningan	435.184	...	119,67	...	10,74	...
Cirebon	491.604	...	229,64	...	10,23	...
Majalengka	566.574	...	128,67	...	10,31	...
Sumedang	436.490	...	105,82	...	8,81	...
Indramayu	578.169	...	196,78	...	11,02	...
Subang	449.186	...	148,99	...	9,23	...
Purwakarta	483.968	...	76,51	...	7,87	...
Karawang	617.901	...	169,80	...	7,08	...
Bekasi	698.154	...	191,00	...	4,36	...
Bandung Barat	471.101	...	169,66	...	9,87	...
Pangandaran	486.285	...	33,09	...	8,03	...
Kota Bogor	730.079	...	67,16	...	5,89	...
Kota Sukabumi	706.415	...	23,17	...	6,90	...
Kota Bandung	644.417	...	99,12	...	3,78	...
Kota Cirebon	571.809	...	28,12	...	8,66	...
Kota Bekasi	864.601	...	129,54	...	3,96	...
Kota Depok	884.633	...	63,45	...	2,31	...
Kota Cimahi	642.016	...	25,97	...	4,20	...
Kota Tasikmalaya	591.600	...	75,22	...	10,84	...
Kota Banjar	451.277	...	10,97	...	5,73	...
Jawa Barat	547.752	575.499	3.654,75	3.550,71	7,02	6,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2025)

Meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang dengan tujuan yang positif untuk meningkatkan status gizi masyarakat, pelaksanaannya di lapangan

tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menjadi perhatian publik. Penting untuk terlebih dahulu memahami bahwa persoalan keamanan pangan dalam program MBG bukan merupakan masalah yang terisolasi di Jonggol, melainkan bagian dari permasalahan sistemik yang lebih luas di tingkat nasional. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa total korban keracunan Program MBG sejak Januari 2025 hingga Mei 2026 telah mencapai 37.270 orang yang tersebar di 31 provinsi, dengan sebagian besar SPPG yang beroperasi belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jawa Barat secara khusus menjadi provinsi dengan jumlah korban keracunan MBG tertinggi secara nasional sepanjang 2025, mencapai 24,34 persen dari total korban di seluruh Indonesia. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Bogor sebagai bagian dari Jawa Barat dalam posisi yang perlu mendapat perhatian serius dalam hal pengawasan keamanan pangan program MBG (BPS Jawa Tengah-BPS-Statistics Indonesia, 2025).

Salah satu peristiwa konkret yang mendapat sorotan terjadi pada September 2025, ketika muncul dugaan kasus keracunan makanan yang melibatkan sejumlah siswa di SMP Negeri 1 Jonggol setelah mengonsumsi makanan yang disediakan melalui Program MBG. Empat siswa SMPN 1 Jonggol mengalami gejala pusing, mual, hingga muntah setelah menyantap menu MBG pada Selasa, 23 September 2025. Keempat siswa yang terdiri dari tiga siswa kelas VIII dan satu siswa kelas VII tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Jonggol untuk mendapatkan penanganan, dengan tiga di antaranya diperbolehkan pulang dan satu siswa masih menjalani rawat inap. Menu yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut adalah

telur balado dan capcay yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan capcay yang disajikan dalam kondisi yang dipertanyakan kualitasnya (Ilmudata Mahkamah Konstitusi RI, 2025).

Gambar 1. 1 Dokumentasi penanganan siswa SMPN 1 Jonggol yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG



Sumber : kompas.com, 2025

Menanggapi insiden tersebut, Pemerintah Kecamatan Jonggol membentuk tim gabungan yang melibatkan unsur Muspika, Kapolsek, Koramil, Dinas Kesehatan, Puskesmas, ahli gizi, dan perwakilan sekolah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi kejadian, dengan fokus pada dapur dan jalur distribusi makanan MBG. Sampel makanan MBG juga dikirim ke laboratorium Pemerintah Kabupaten Bogor untuk dianalisis lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti dari insiden tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa meskipun tidak ada korban jiwa, insiden ini tetap menimbulkan dampak psikologis serius bagi para siswa, termasuk munculnya trauma yang menyebabkan sebagian pelajar menolak mengonsumsi MBG di sekolah setelah kejadian tersebut. (DroneempritCisdi, 2025)

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas implementasinya di tingkat lapangan. Program yang pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan status kesehatan dan kualitas gizi peserta didik justru berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila proses pelaksanaannya tidak dikelola secara optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan penerima manfaat, tetapi juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program, partisipasi orang tua dalam mendukung pelaksanaannya, serta persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Selain itu, belum tercapainya manfaat program secara optimal dapat menjadi indikasi bahwa aspek perencanaan, pengelolaan logistik, serta mekanisme pengawasan operasional masih memerlukan evaluasi dan penguatan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang efektif, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh penerima manfaat sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Adisasmito, 2019:19).

Lebih lanjut, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol tidak hanya berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting lainnya, seperti keamanan pangan, efektivitas pengawasan, kesiapan sarana dan prasarana distribusi, serta kualitas koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan program. Munculnya kasus dugaan keracunan makanan tersebut dapat dipandang

sebagai indikasi adanya potensi kelemahan dalam pengelolaan rantai distribusi pangan, pengawasan sanitasi, maupun mekanisme pengendalian mutu makanan sebelum didistribusikan dan dikonsumsi oleh peserta didik. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa jika kasus keracunan hanya terjadi di satu kabupaten saja, mungkin hal tersebut merupakan persoalan teknis semata. Namun, ketika kasus serupa terjadi di hampir seluruh provinsi, maka persoalannya sudah harus dipandang sebagai kelemahan sistem di tingkat pusat, bukan sekadar kelalaian teknis di lapangan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius mengingat keberhasilan program tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara dalam menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang disajikan. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan program dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi para penerima manfaat. (Kemenkes. 2025)

Selain berkaitan dengan aspek kesehatan dan pengawasan, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memiliki hubungan yang erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai aktor ekonomi, termasuk penyedia bahan pangan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pihak-pihak yang berperan dalam proses distribusi makanan, sehingga berpotensi memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Melalui keterlibatan berbagai

pihak tersebut, program ini diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi lokal, menciptakan peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pencapaian manfaat ekonomi tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola program yang diterapkan. Apabila standar keamanan pangan, sistem distribusi, dan mekanisme pengawasan tidak berjalan secara optimal, maka manfaat yang diharapkan dari program tersebut dapat berkurang bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Risiko kesehatan yang muncul akibat kelalaian dalam pengelolaan pangan, misalnya, tidak hanya dapat merugikan penerima manfaat secara langsung, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola, pengawasan, serta jaminan keamanan pangan yang diterapkan selama proses pelaksanaannya.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif yang dirumuskan dalam kebijakan dengan realitas implementasinya di lapangan. Keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari besarnya alokasi anggaran atau jumlah penerima manfaat yang berhasil dijangkau, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarlembaga, kesiapan infrastruktur pendukung distribusi, kualitas pengawasan terhadap keamanan pangan, serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola berbagai tantangan dan risiko yang timbul selama proses pelaksanaan program. Faktor-faktor tersebut menjadi elemen

penting yang menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Tahun 2025–2026?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Tahun 2025–2026?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Tahun 2025–2026.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung mempengaruhi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Tahun 2025–2026.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan publik melalui penggunaan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III, yang menekankan pentingnya aspek informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, serta pembagian potensi dalam proses implementasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang berperan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan di tingkat lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang memiliki fokus pada kajian implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, serta rekomendasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana program, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program, memperkuat koordinasi antarlembaga yang terlibat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses distribusi dan keamanan pangan. Selain itu, hasil penelitian dapat mendukung upaya penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan,

1.6 Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun penulis	Judul Tulisan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ikka Febryanti, Indiati, Muhammad Alwiadi Pane, Pudji Astuti 2025, Publikasi Jurnal Ilmu Administrasi Publik	Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Studi kasus SDN 3 Kepanjen, Malang	Menemukan bahwa MBG sudah diimplementasikan di SDN 3 Kepanjen sejak awal 2025; keberhasilan dipengaruhi oleh kebijakan nasional (Badan Gizi Nasional) dan kebijakan satuan pendidikan; faktor penghambat utama: keterbatasan anggaran dan tata kelola di tingkat sekolah; belum ada peraturan tertulis lokal yang rinci.	Studi kasus lapangan kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi). Fokus pada implementasi praktis (kebijakan, tata kelola, anggaran) memberikan bukti empiris lapangan
2	Sri Wahyuni Pratiwi1 Parlaungan Gabriel Siahaan2 Novridah Reanti Purba3 Sahriani4 Sry Enjelina Saragih5 Yulia Evelyn Simanjuntak6 Winro William Sinura, 2025 , Publikasi Indonesian Journal of Education and Development Research	Implementasi Nilai Pancasila Keadilan Sosial Dalam Program Makan Bergizi Gratis pada Kebijakan Presiden Prabowo Subianto	MBG memiliki potensi besar meningkatkan gizi dan mengurangi ketimpangan sosial. Tantangan utama: distribusi tidak merata, data penerima tidak akurat, kualitas gizi kurang konsisten, kendala logistik, dan koordinasi antarinstansi lemah. Menunjukkan bahwa peran Pancasila (sila ke-5) tercermin	Berbeda dari studi implementasi lainnya karena berfokus pada <i>nilai Pancasila</i> sebagai perspektif analisis utama. Tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga aspek filosofis (keadilan sosial). Menggunakan studi literatur, bukan studi lapangan. Menelaah juga dampak sosial seperti stigma, ketidaksetaraan simbolik, dan pemerataan

No	Nama / Tahun penulis	Judul Tulisan	Hasil Penelitian	Perbedaan
			melalui pemerataan akses makanan bergizi bagi seluruh anak sekolah. Menekankan pentingnya evaluasi, pengawasan, dan perbaikan sistem agar program tepat sasaran.	kesempatan pendidikan melalui perspektif ideologi Pancasila.
3	Ramlan1, Arifin Ahmad, Sunata, Sopyan Hendrayana, 2025, Publikasi Journal of Innovative and Creativity (Joecy)	Kebijakan MBG di Indonesia: Belajar dari AS dan Korea Selatan (perbandingan)	Membandingkan praktik program makan gratis di AS & Korea Selatan dengan konteks Indonesia; menyimpulkan ada pembelajaran tentang desain universal vs terarah, logistik, dan evaluasi dampak menyarankan adopsi praktik terbaik (mis. integrasi UMKM, mekanisme logistik teruji).	Kajian perbandingan literatur (komparatif internasional). Memberi perspektif pelajaran internasional yang dapat diadaptasi ke konteks Indonesia.
4	Suardi & Amy Syah Purmadani, 2025. Publikasi Journal of Economics Development Research	Makan Bergizi Gratis dan Dampak bagi Pertumbuhan Ekonomi	Menyajikan analisis dampak ekonomi: MBG berpotensi mendorong pertumbuhan UMKM/pertanian lokal tetapi juga menimbulkan beban fiskal besar (anggaran besar dari APBN); menekankan kebutuhan perencanaan anggaran dan model pembiayaan berkelanjutan.	Fokus pada analisis ekonomi-publik dan implikasi fiskal beda dengan studi implementasi atau hukum; menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dari studi kepustakaan.

No	Nama / Tahun penulis	Judul Tulisan	Hasil Penelitian	Perbedaan
5	Ontran S. Riyanto & Mei R. Elfrida Sinaga, 2025, Publikasi Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia	Penegakan Hak Anak atas Makanan aman dan sehat : Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara	Menelaah aspek yuridis: kerangka hukum nasional kuat tetapi implementasi pengawasan keamanan pangan lemah; insiden keracunan menimbulkan isu pertanggungjawaban negara (administratif, perdata, pidana); hambatan: kapasitas teknis, birokrasi, akses keadilan. Rekomendasi: aturan pelaksana khusus, audit kualitas, mekanisme kompensasi.	Perspektif hukum/hak asasi menyorot aspek akuntabilitas dan perlindungan hak anak yang kurang mendapat perhatian di kajian ekonomi/implementasi. Sangat relevan jika penelitian Anda mempertimbangkan dimensi hukum.

Sumber: hasil olahan peneliti tahun 2026

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi objek kajian dari beragam perspektif keilmuan. Berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman mengenai program, baik dari aspek kebijakan, ideologi, ekonomi, hukum, maupun perbandingan praktik pelaksanaannya di berbagai negara.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih lebih banyak menitikberatkan pada analisis kebijakan, nilai-nilai ideologis yang mendasarinya, dampak ekonomi yang ditimbulkan, perbandingan dengan program serupa di negara lain, serta aspek regulasi dan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Kajian yang secara spesifik membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tingkat daerah, khususnya di tingkat kecamatan, masih tergolong terbatas. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan analisis mengenai proses implementasi kebijakan dengan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi secara simultan juga masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pelaksanaan program serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih terdapat dalam kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pada tingkat daerah. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada periode 2025–2026. Kajian ini tidak hanya diarahkan untuk memahami bagaimana program tersebut dilaksanakan di lapangan, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan yang muncul selama proses implementasi kebijakan berlangsung.

Dalam menganalisis proses implementasi program, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk memahami sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaksana di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teori faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, yang mencakup aspek isi kebijakan, dukungan, serta pembagian potensi. Dengan mengombinasikan kedua perspektif teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program MBG, sekaligus memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaan program di tingkat lokal.

Di samping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas pelaksanaan program di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan proses implementasi Program MBG, tetapi juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi, serta menganalisis dinamika yang muncul selama pelaksanaan program berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada bidang kesehatan, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas, kualitas, dan keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah.

1.7. Landasan Teoritik / Konseptual

1.7.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan keputusan yang telah dibuat. Proses implementasi berperan penting dalam mengantarkan kebijakan publik kepada masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Pressman dan Wildavsky (2020:21-22) implementasi mencakup beberapa kata kunci, seperti menjalankan kebijakan, memenuhi janji-janji dalam dokumen kebijakan, menghasilkan output sesuai tujuan kebijakan, dan menyelesaikan misi yang harus dicapai. Istilah implementasi menunjukkan serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan

maksud tentang tujuan dan hasil program yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. (Sufi, 2022:5) berpendapat Penerapan kebijakan ini melibatkan proses yang meliputi pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, serta dampak nyata keputusan baik yang diharapkan maupun tidak. Dalam persiapan implementasi, perlu memastikan ketersediaan sumber daya, rencana, dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan oleh pihak terkait. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah Tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi diartikan sebagai pengadminis-trasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut (Lester & Stewart, 2000:104).

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji, seorang pakar kebijakan asal Afrika (Manongga, 2021:66), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah hal penting dan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang hanya berupa impian atau rencana bagus akan sia-sia jika tidak diimplementasikan dengan baik. Tahapan operasional dalam implementasi kebijakan (Deddy, 2016:69) mencakup beberapa langkah yang saling terkait. Tahap pertama adalah interpretasi, di mana kebijakan abstrak dikembangkan menjadi petunjuk pelaksanaan teknis melalui

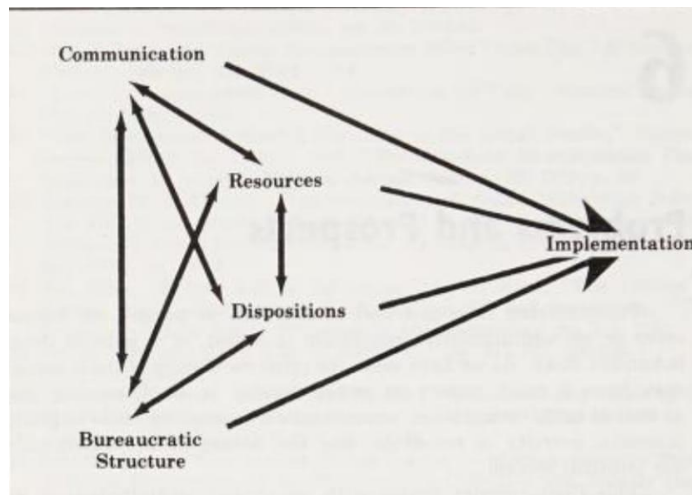
proses komunikasi dan sosialisasi. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan seperti Peraturan Daerah dan Undang-Undang, serta keputusan eksekutif dan manajerial. Selanjutnya, pada tahap pengorganisasian, dilakukan penentuan pelaksana kebijakan, penentuan prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM), serta pengaturan pembiayaan dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Manajemen pelaksanaan dan jadwal implementasi juga ditetapkan untuk memastikan efisiensi pelaksanaan. Tahap implikasi merupakan realisasi dari langkah-langkah sebelumnya, di mana kebijakan diwujudkan dan dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

1.7.2 Model Implementasi Kebijakan George Edwards III

Model implementasi kebijakan menurut teori Model George Edwards III (1980:1), mengemukakan dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur 21

birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

Gambar 1. 2 Model Implementasi Kebijakan menurut Edwards III



(Sumber: Edwards, 1980:148)

1. *Communication* (Komunikasi) Edwards III (1980:17) menegaskan: Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat implementor, khususnya dalam memahami dekripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan.
2. *Resourches* (Sumber Daya) Sehubungan dengan faktor Resourches (Sumber Daya), Edwards III (1980:53) menjelaskan: Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan. Sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan tesa bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif.
3. *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana) Edwards III (1980:89) menjelaskan: Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk

melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi) Edwards III (1980:125) menjelaskan: Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. Standar kadang-kadang lebih menghambat

Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan menurut Edwards III akan digunakan sebagai teori pertama atau grand theory. Pemilihan teori model implementasi kebijakan menurut Edwards III didasarkan pada penempatan proses implementasi sebagai fokus untuk memberikan kerangka analitis yang jelas, sistematis, dan langsung berhubungan dengan karakter implementasi kebijakan, serta dapat digunakan untuk memberikan analitis sehingga fokusnya pada proses, perilaku aktor, dan kondisi organisasi, sehingga hal tersebut sangat sesuai untuk mengungkap proses implementasi kebijakan di lapangan. Model ini membantu peneliti menggali bagaimana interaksi antar pelaksana memengaruhi hasil implementasi. Dengan demikian, model ini dianggap paling tepat untuk mendukung tujuan penelitian dalam menjelaskan proses implementasi.

1.7.3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi George Edwards III

Menurut Edwards III (1980:147), proses kebijakan tidak berhenti pada tahap pengesahan undang-undang, penerbitan peraturan, maupun penetapan putusan pengadilan, tetapi berlanjut pada tahap implementasi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Edwards III menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, beberapa jenis kebijakan memiliki kecenderungan lebih besar menghadapi permasalahan implementasi dibandingkan kebijakan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan implementasi melalui faktor yang mempengaruhi implementasi, baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga peradilan, serta melalui berbagai alternatif penyelesaian lainnya guna mengatasi hambatan implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan menurut George Edwards III (1980:147-164), juga menjelaskan faktor yang mempengaruhi baik penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan sebagai berikut: isi Kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Mengimplementasikan kebijakan pasti terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dari implementasi kebijakan, untuk itu perlu adanya usaha meminimalisir resiko dengan memenuhi syarat-syarat implementasian kebijakan. Edwards III menjelaskan implementasi kebijakan memiliki beberapa faktor yang dipengaruhi antara lain (Edwards III, 1980:147-164):

1. *Policiy* (Isi Kebijakan) tidak semua jenis kebijakan memiliki tingkat kesulitan implementasi yang sama. Klasifikasi kebijakan yang selama ini digunakan dalam ilmu politik belum cukup untuk menjelaskan mengapa suatu kebijakan berhasil atau gagal diimplementasikan. Oleh karena itu, Edwards III

menjelaskan isi kebijakan berdasarkan karakteristik yang berpotensi menimbulkan pengaruh implementasi. Kebijakan yang cenderung menghadapi pengaruh implementasi meliputi Kebijakan baru (*new policies*), kebijakan yang belum pernah diterapkan sebelumnya sehingga pelaksana maupun masyarakat belum memiliki pengalaman dalam menjalankannya, sehingga kondisi ini sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai prosedur, pembagian tugas, maupun mekanisme pelaksanaan sehingga berpotensi menimbulkan hambatan implementasi. Kebijakan yang bersifat desentralisasi (*decentralized policies*), kebijakan desentralisasi merupakan kebijakan yang pelaksanaannya melibatkan berbagai tingkat pemerintahan atau organisasi, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi pelaksana. Banyaknya aktor yang terlibat menyebabkan koordinasi, komunikasi, serta pembagian kewenangan menjadi lebih kompleks sehingga implementasi sering mengalami kendala. Kebijakan yang kontroversial (*controversial policies*), kebijakan kontroversial adalah kebijakan yang menimbulkan perbedaan pendapat atau penolakan dari masyarakat maupun kelompok kepentingan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mengurangi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga implementasinya menjadi lebih sulit. Kebijakan yang kompleks (*complex policies*), kebijakan kompleks adalah kebijakan yang memiliki tujuan, prosedur, sasaran, atau aktor pelaksana yang banyak dan saling berkaitan. Kompleksitas tersebut meningkatkan kebutuhan akan koordinasi, sumber daya, dan pengawasan sehingga risiko kegagalan implementasi menjadi lebih besar. Kebijakan yang berkaitan dengan kondisi krisis (*crisis-related policies*), kebijakan ini diterapkan untuk menghadapi situasi darurat atau krisis, seperti bencana alam, pandemi, konflik, maupun keadaan luar biasa lainnya. Pelaksanaannya biasanya harus dilakukan dalam waktu singkat dengan kondisi yang tidak pasti sehingga membutuhkan respons cepat, fleksibilitas, dan sumber daya yang memadai. Serta kebijakan yang dibentuk melalui keputusan lembaga peradilan (*judicial policies*), yaitu kebijakan yang lahir sebagai konsekuensi dari putusan lembaga peradilan, sehingga pemerintah atau instansi terkait diwajibkan untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Menurut Edwards III, suatu kebijakan juga dapat memiliki kombinasi dari beberapa karakteristik tersebut (*combinations of characteristics*), sehingga tingkat kesulitan implementasinya menjadi semakin tinggi. Isi kebijakan dapat menjadi penghambat implementasi karena isi kebijakan tersebut bisa baru, terdesentralisasi, kontroversial, kompleks, krisis, yang didirikan oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

2. *Follow up* (Dukungan) Faktor pengaruh implementasi kebijakan tidak hanya perlu diidentifikasi, tetapi juga harus diikuti dengan upaya perbaikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Salah satu cara yang paling mendasar untuk meningkatkan keberhasilan implementasi adalah melalui mekanisme dukungan (*follow-up*). Tindak lanjut merupakan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan untuk memastikan bahwa keputusan, instruksi, atau peraturan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edwards III

menegaskan bahwa faktor pengaruh implementasi terjadi bukan karena kebijakan yang dirumuskan kurang baik, melainkan karena tidak adanya pengawasan dan tindak lanjut dari pembuat kebijakan terhadap pelaksanaannya. Dukungan dapat menjadi pendukung implementasi jika para pelaksana dan pembuat kebijakan mendukung dalam suatu kebijakan tersebut. Ketika suatu kebijakan berjalan tanpa adanya dukungan, maka kebijakan tersebut sulit untuk berjalan.

3. *Potential of other remedies* (Pembagian Potensi) peningkatan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada mekanisme tindak lanjut oleh pelaksana maupun pembuat kebijakan, tetapi juga memerlukan berbagai alternatif penyelesaian (*potential of other remedies*). Langkah awal dalam merumuskan alternatif tersebut adalah mengidentifikasi secara tepat berbagai hambatan yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal. Setelah penyebab hambatan diketahui, maka dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi dan penyebab yang melatarbelakangi hambatan implementasi. Berbagai alternatif penyelesaian dapat berupa penyempurnaan isi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarorganisasi, penyediaan sumber daya yang memadai, penyempurnaan prosedur kerja, maupun bentuk perbaikan lainnya yang relevan dengan kebutuhan implementasi. Dengan demikian, *potential of other remedies* merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara kontekstual dan adaptif, sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembagian Potensi berkaitan dengan koordinasi masyarakat yang luas dan potensi yang harus ditingkatkan. Koordinasi menjadi titik kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi baik pendukung dan penghambat implementasi kebijakan menurut George Edwards III (1980:147-164), Pemilihan faktor pengaruh didasarkan pada penempatan faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi sebagai fokus untuk memberikan kerangka analitis yang jelas, dan langsung berhubungan dengan karakter implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, sehingga hal tersebut sangat sesuai untuk mengungkap dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Faktor ini membantu peneliti menggali faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan, dengan demikian ini dianggap paling

tepat untuk mendukung tujuan penelitian dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi baik penghambat dan pendukung implementasi.

1.8 Alur Berpikir

Alur berpikir penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, melalui penyediaan makanan bergizi secara terencana dan berkelanjutan.

Objek penelitian ini berfokus pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Tahun 2025–2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya berbagai dinamika dalam pelaksanaan program, mulai dari tantangan distribusi makanan, keterbatasan sumber daya, hingga munculnya dugaan kasus keracunan makanan yang menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang telah dirumuskan, tetapi juga oleh proses implementasi yang berlangsung di lapangan.

Untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis secara komprehensif, penelitian ini menggunakan dua teori implementasi kebijakan, yaitu teori George C. Edwards III dan teori Jan Merse. Teori George C. Edwards III digunakan karena menekankan empat variabel penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi,

dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana kesiapan organisasi pelaksana dalam menjalankan Program MBG di Kecamatan Jonggol.

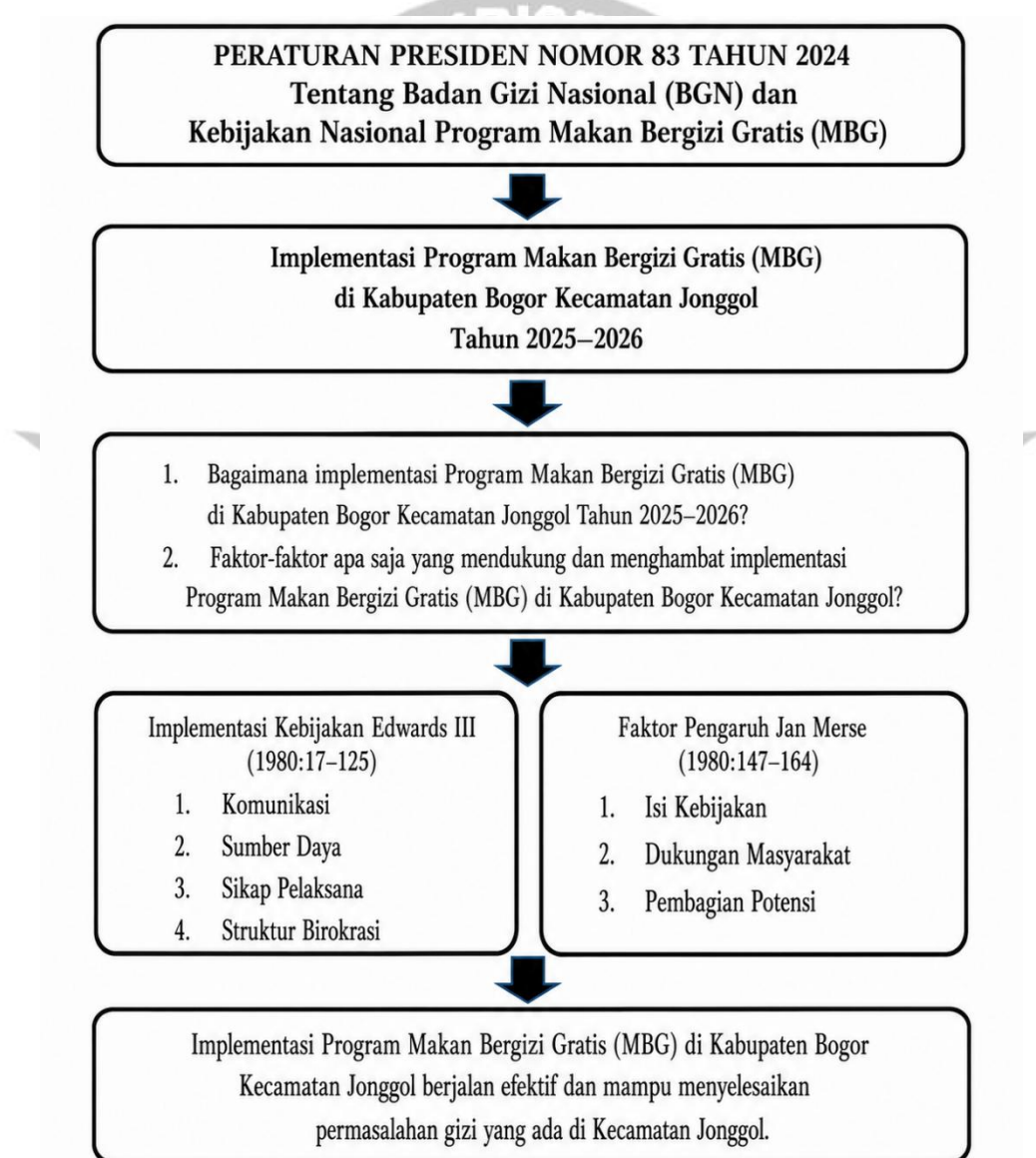
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Jan Merse yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Teori ini digunakan untuk melengkapi analisis implementasi kebijakan dengan melihat aspek substansi kebijakan serta keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat program.

Berdasarkan kedua teori tersebut, penelitian ini melakukan analisis terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Jonggol dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat yang muncul selama pelaksanaan program. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi berlangsung, apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan kebijakan, serta bagaimana kesiapan sumber daya dan dukungan lingkungan dalam menunjang keberhasilan program.

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Tahun 2025–2026. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan maupun masyarakat penerima manfaat sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program.

Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam meningkatkan efektivitas implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, program ini dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, aman, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik.

Tabel 1. 3 Alur Berpikir



Sumber: Olahan Penulis, 2025

Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam meningkatkan efektivitas implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, program ini dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, aman, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi dan kesehatan peserta didik.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, holistik, dan komprehensif mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada periode 2025–2026. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil atau keluaran kebijakan, melainkan lebih menitikberatkan pada pemahaman terhadap proses implementasi, dinamika pelaksanaan, serta berbagai fenomena yang terjadi dalam praktik kebijakan di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara lebih mendalam pengalaman, pandangan, dan interaksi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program, sehingga mampu menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai realitas implementasi kebijakan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena secara alami dalam konteks sosial yang sebenarnya, tanpa memanipulasi variabel atau kondisi yang ada. Peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data

melalui interaksi dengan informan, observasi lapangan, serta penelusuran dokumen, sehingga mampu menangkap secara utuh bagaimana praktik pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan MBG berlangsung di sekolah-sekolah serta bagaimana hambatan-hambatan implementasi muncul dalam praktik.

Menurut Sugiyono (2009), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menekankan kedalaman makna, proses, dan konteks, bukan sekadar angka atau ukuran statistik. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai tepat untuk mengkaji implementasi kebijakan publik seperti Program Makan Bergizi Gratis, yang melibatkan banyak aktor, kepentingan, serta interaksi sosial di dalamnya.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, serta penilaian para aktor kebijakan, seperti pihak pemerintah daerah, sekolah, penyedia makanan, tenaga kesehatan, dan orang tua siswa, terhadap pelaksanaan MBG. Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk memahami faktor-faktor struktural, teknis, dan kultural yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi program, termasuk persoalan logistik, higienitas, pengawasan, serta koordinasi antar instansi.

1.9.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan peneliti untuk mengarahkan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari penentuan fokus kajian, teknik pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah studi kasus kualitatif, karena

penelitian berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap satu kasus spesifik, yaitu implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol.

Pemilihan desain studi kasus didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara komprehensif bagaimana kebijakan MBG dijalankan dalam konteks nyata, bagaimana proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan dilakukan, serta bagaimana berbagai aktor terlibat dalam pelaksanaannya. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara detail dinamika implementasi kebijakan, interaksi antar pemangku kepentingan, serta berbagai permasalahan yang muncul di lapangan, termasuk insiden keracunan yang terjadi pada siswa penerima MBG.

Menurut Creswell (2013:155), studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif di mana peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau individu dalam konteks kehidupan nyata (real-life context), dengan menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena implementasi MBG tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan proses yang melibatkan kebijakan, struktur birokrasi, pelaksana, dan lingkungan sosial.

Penelitian ini menggunakan studi kasus intrinsik, karena fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam satu kasus tertentu, yaitu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol sebagai daerah yang juga ikut serta dalam program MBG. Peneliti tidak

bertujuan untuk membandingkan antar daerah, melainkan untuk menggali secara detail karakteristik, hambatan, dan pola implementasi kebijakan di Kecamatan Jonggol.

Melalui desain ini, penelitian menelaah bagaimana pemerintah, sekolah, penyedia makanan, serta instansi terkait menjalankan mandat kebijakan MBG, bagaimana mekanisme pengawasan dan koordinasi dilakukan, serta bagaimana realitas implementasi di lapangan berdampak pada keamanan pangan dan kepercayaan masyarakat. Dengan desain studi kasus kualitatif, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang utuh, kontekstual, dan berbasis realitas empiris mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Jonggol.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2022:85) bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan ada tiga macam observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dapat menggunakan teknik pengumpulan data serta penjelasan dalam mendukung penelitian sebagai berikut:

1. **Wawancara:** Wawancara terbuka adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat fleksibel dan tidak terstruktur (Purwanza, 2022:85). Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan mendalam. Dalam wawancara ini dapat dilakukan melalui secara

langsung maupun telepon. Wawancara pada informan yaitu: KPPG, SPPG, Ahli gizi Dinas Kesehatan, PIC Sekolah, Murid dan Masyarakat. Dalam wawancara ini menanyakan terkait implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol tahun 2025-2026 serta faktor yang mempengaruhi implementasi baik penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut.

2. Studi Dokumen: Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Creswell Catatan tersebut dapat berupa catatan tertulis, laporan, foto, artikel, publikasi atau dokumen lain yang dapat memberikan informasi penting (Creswell, 2014:190). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berbentuk foto, antara lain foto kegiatan wawancara dengan informan, foto kondisi lingkungan sekitar. Teknik ini dipilih karena foto mampu memberikan bukti visual yang konkret mengenai situasi, kondisi di lapangan. Dokumen berbentuk foto juga berfungsi sebagai pendukung dari hasil wawancara dan observasi, sehingga memperkuat validitas dan akurasi data dalam penelitian mengenai implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol tahun 2025-2026.

1.9.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan tidak didasarkan pada prosedur sampling, melainkan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang

disesuaikan dengan tujuan serta fokus penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan fenomena yang menjadi objek kajian, sehingga mampu memberikan data dan informasi yang mendalam, rinci, serta sesuai dengan kebutuhan penelitian (Creswell, 2013:155). Melalui proses wawancara dengan informan yang dipilih, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Patton, purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, serta posisi individu yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Patton, 2002:230). Teknik ini digunakan untuk memilih informan yang dinilai mampu memberikan informasi yang spesifik dan mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti karena memiliki keterlibatan langsung dalam fenomena yang menjadi fokus kajian.

Dalam penelitian ini, penggunaan purposive sampling dianggap sesuai karena memungkinkan peneliti untuk menentukan informan yang memiliki peran langsung dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informan yang dipilih terdiri atas berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, seperti Komite Pengawasan Program Gizi (KPPG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinas Kesehatan, serta instansi terkait

lainnya. Selain itu, pihak sekolah sebagai penerima manfaat program juga dijadikan informan karena memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan Program MBG di tingkat lapangan.

Tabel 1. 4 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Kapasitas	Jumlah
1	Roby Abdullah	Staf KPPG Bogor	Anggota KPPG Bogor	1
2	Sari Hanna Br Gultom	Kepala SPPG Jonggol Sukamaju	PJ SPPG	1
3	Bintang Pamungkas Putra N	Kepala SPPG Jonggol Sukasirna	PJ SPPG	1
4	Pramadhan Mahesa Agni	Kepala SPPG Jonggol 5	PJ SPPG	1
5	Hema Restu Tasyiban	Kepala SPPG Jonggol 2	PJ SPPG	1
6	Dian	Ahli Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes Kabupaten Bogor)	PJ Gizi Dinkes Kabupaten Bogor	1
7	Titin Handayani S, Pd	Kepala Sekolah	PIC Sekolah SDN 3 Jonggol	1
8	Muhamad Mahpudin, S.pd.I, M.Pd	Kepala Sekolah	PIC Sekolah SD Yayasan Mi Hidayatul Athfal	1
9	Setyawati S, Pd	Kepala Sekolah	PIC Sekolah SMPN 1 Jonggol	1
10	Sri Purnama Shanti	Kepala Sekolah	PIC Sekolah SMA PGRI 27 Jonggol	1
11	Endah	Masyarakat	Orang Tua	1
12	Kasep	Masyarakat	Orang Tua	1
13	Regina Amandanasya	Murid	Siswi SMPN 1 Jonggol	1
14	Siti Azizah	Murid	Siswi SMPN 1 Jonggol	1
Total				14 orang

Sumber: hasil olahan peneliti, tahun 2026

Menurut Creswell (1999:118), informan dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat keterlibatan, kapasitas pengetahuan, serta peran yang dimiliki oleh informan terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan karakteristik dan posisi masing-masing informan, informan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam ketiga kategori tersebut untuk memperoleh data yang lebih beragam dan komprehensif.

1. Informan utama merupakan individu yang memiliki keterlibatan langsung dan peran yang dominan dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang menjadi fokus penelitian (Creswell, 1999:118). Informan dalam kategori ini umumnya memiliki akses yang luas terhadap informasi, pengalaman yang mendalam, serta pemahaman yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, informan utama terdiri atas Sari Hanna Br. Gultom selaku Kepala SPPG Jonggol Sukamaju, Bintang Pamungkas Putra N selaku Kepala SPPG Jonggol Sukasirna, Pramadhan Mahesa Agni selaku Kepala SPPG Jonggol 5, dan Hema Restu Tasyiban selaku Kepala SPPG Jonggol 2. Keempat informan tersebut dipilih karena memiliki tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dalam aspek pengelolaan operasional, distribusi makanan, pengawasan pelaksanaan program, serta koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, informasi yang mereka berikan menjadi sumber utama dalam memahami proses implementasi Program MBG di tingkat lapangan.

2. Informan kunci merupakan individu yang memiliki pengetahuan khusus dan pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Creswell, 1999:119). Meskipun tidak selalu terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program sehari-hari, informan kunci memiliki informasi strategis yang dapat membantu peneliti memahami konteks kebijakan secara lebih luas. Dalam penelitian ini, informan kunci adalah Roby Abdullah selaku Staf KPPG Bogor sekaligus anggota KPPG Bogor, serta Dian selaku Ahli Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Kedua informan tersebut dipilih karena memiliki peran yang signifikan dalam aspek pengawasan, evaluasi, koordinasi, serta pengendalian kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG. Informasi yang diberikan oleh mereka diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi program dari perspektif kebijakan, pengawasan, dan pemenuhan standar gizi.
3. Informan tambahan adalah individu yang memberikan informasi pendukung guna melengkapi dan memperkaya data penelitian (Creswell, 1999:120). Meskipun keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan tidak sebesar informan utama dan informan kunci, informasi yang diberikan tetap memiliki nilai penting dalam menjelaskan fenomena yang diteliti secara lebih utuh. Dalam penelitian ini, informan tambahan terdiri atas Titin Handayani, S.Pd selaku Kepala SDN 3 Jonggol, Muhamad Mahpudin, S.Pd.I., M.Pd selaku Kepala SD Yayasan MI Hidayatul

Athfal, Setyawati, S.Pd selaku Kepala SMPN 1 Jonggol, dan Sri Purnama Shanti selaku Kepala SMA PGRI 27 Jonggol sebagai perwakilan pihak sekolah penerima manfaat program. Selain itu, Endah dan Kasep sebagai orang tua peserta didik, serta Regina Amandanasya dan Siti Azizah sebagai siswi SMPN 1 Jonggol juga termasuk dalam kategori informan tambahan. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung sebagai penerima manfaat maupun pihak yang berinteraksi dengan pelaksanaan Program MBG, sehingga dapat memberikan informasi mengenai manfaat program, kendala yang dihadapi, serta persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Melalui klasifikasi informan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang mendalam, beragam, dan komprehensif mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Data yang diperoleh dari berbagai kelompok informan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai proses pelaksanaan program, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta berbagai dinamika yang terjadi selama kebijakan tersebut dijalankan.

1.9.5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:102), dalam penelitian kualitatif instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang didukung oleh instrumen pendukung seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, serta dokumentasi.

Instrumen penelitian digunakan untuk membantu peneliti memperoleh data yang relevan, sistematis, dan sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara semi terstruktur yang disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan teori faktor pengaruh implementasi kebijakan. Pedoman wawancara tersebut digunakan sebagai acuan dalam menggali informasi dari para informan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Tahun 2025–2026.

Instrumen penelitian berdasarkan teori George C. Edward III difokuskan pada empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan di lapangan. Selain itu, instrumen penelitian juga disusun berdasarkan teori faktor pengaruh implementasi kebijakan yang meliputi isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Keempat faktor tersebut digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Pedoman wawancara disusun secara sistematis sesuai dengan indikator pada masing-masing dimensi dan faktor penelitian sehingga dapat membantu peneliti memperoleh data yang mendalam, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun rincian instrumen penelitian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 5 Instrumen Penelitian

Konsep/Teori	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan
Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (1980)	Komunikasi	Koordinasi antar pelaksana	Bagaimana bentuk koordinasi antara Badan Gizi Nasional, SPPG, sekolah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis? . Apakah koordinasi tersebut berjalan secara rutin dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program?
		Ketersediaan SDM	Apakah jumlah tenaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis telah mencukupi kebutuhan pelaksanaan program?
	Sumber Daya	Anggaran	Apakah anggaran yang tersedia telah mencukupi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis? Bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan agar pelaksanaan program berjalan secara optimal?
		Sarana dan prasarana	Apakah fasilitas pendukung seperti dapur, kendaraan distribusi, dan tempat penyimpanan makanan telah memadai?
	Disposisi	Komitmen pelaksana	Bagaimana komitmen pelaksana dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sesuai ketentuan yang berlaku?
		Respons terhadap permasalahan	Bagaimana pelaksana merespons kendala yang terjadi selama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis?

	Struktur Birokrasi	Mekanisme pengawasan	Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan? Siapa saja yang terlibat dalam proses pengawasan program tersebut?
Faktor Pengaruh Edwards III (1980:147 164)	Isi Kebijakan	Perbaikan terhadap isi kebijakan	Apakah isi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sekolah? Bagaimana upaya perbaikan isi kebijakan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program?
	Dukungan	Penerimaan masyarakat	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis? Apakah masyarakat menerima dan mendukung keberlanjutan program tersebut
	Pembagian Potensi	Sumber daya	Apa yang perlu dibenahi dari sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Bogor kecamatan Jonggol

Sumber: Olahan Penulis, 2026

1.9.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1994:10-12), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994:10-

12), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir, sehingga analisis tidak bersifat terpisah dari proses pengumpulan data, melainkan berjalan secara simultan dan berkesinambungan.

Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol, khususnya dalam konteks proses pelaksanaan kebijakan, keamanan pangan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Data diperoleh dari berbagai sumber melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, makna, dan hubungan antar konsep yang relevan dengan fokus penelitian.

Melalui teknik analisis data ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan Program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan keamanan pangan dan kepercayaan masyarakat.

1.10 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terfokus dan terarah pada fenomena yang diteliti, diperlukan perumusan pokok inti dari setiap bab. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika penulisan secara terstruktur untuk memastikan setiap bagian mencakup aspek-aspek penting yang mendukung pembahasan utama sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan pemerintah era Prabowo-Gibran Rakabuming Raka serta berbagai permasalahan implementasinya di Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol. Pada bab ini juga dibahas mengenai rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, landasan teoritik dan konseptual, alur berpikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DAN KONDISI DI KABUPATEN BOGOR KECAMATAN JONGGOL

Bab ini membahas gambaran umum Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan nasional, meliputi dasar hukum, tujuan program, sasaran penerima manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program. Selain itu, bab ini juga menjelaskan profil Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang meliputi kondisi geografis, demografis, kondisi sosial masyarakat, serta karakteristik wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pembahasan ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan kondisi empiris pelaksanaan program di lapangan.

BAB III: IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BOGOR KECAMATAN JONGGOL

Bab ini berisi analisis mendalam mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C.

Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada bab ini juga dibahas berbagai factor Pendukung dan penghambat implementasi program, seperti kendala distribusi makanan, keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta aspek keamanan pangan.

BAB IV: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BOGOR KECAMATAN JONGGOL

Bab ini berisi analisis mendalam mengenai factor pengaruh implementasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang meliputi informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, pembagian potensi. Pada bab ini juga dibahas berbagai factor pengaruh implementasi program, seperti informasi, antarinstansi, bagaimana isi kebijakan, dukungan masyarakat serta pembagian potensinya seperti apa.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, serta pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, guna perbaikan kebijakan dan implementasi di masa mendatang.